

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini dipaparkan tinjauan pustaka yang menguraikan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian sekarang; kajian teori atau konsep yang berkaitan dengan pragmatik dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini. Uraian-uraian tersebut akan digunakan sebagai pijakan untuk memahami dan melaksanakan penelitian ini.

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu, yang berkaitan penelitian sekarang, yang mengkaji masalah kesantunan berbahasa dan atau tindak tutur direktif dapat dijumpai pada penelitian yang dilakukan oleh Shigimitsu, Murata, dan Otsuka (2006), Karafoti (2007), Cheung (2009), Prayitno (2009), Mukhamdanah (2011), Ambuyo, Indede, dan Karanja (2011), David, Hei, dan DeAlwis (2012), Phisghadam dan Navari (2012), , Normiani dan Sabhan (2013), Suparno (2014), dan Gunawan (2014).

Shigimitsu, Murata, dan Otsuka (2006) menemukan lima fenomena linguistik penggunaan bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari, fenomena tersebut meliputi (1) *topics*: merubah atau mengalihkan topik percakapan adalah tidak santun/kasar dalam budaya Jepang, (2) *inductive development of talks*: orang Jepang cenderung mengungkapkan pengalaman pribadi meskipun jika dia diminta memberi pendapat tentang sesuatu, (3) *co-consstruction*: orang Jepang sering membuat ujaran-ujaran yang tidak lengkap seolah-olah mitra tuturnya sudah mengetahui apa yang akan ia tuturkan, (4) *back-chanelling*: orang Jepang banyak menggunakan back-chanell ketika berkomunikasi, dan (5) *pause*: orang Jepang dan Cina tidak merasa keberatan atau risi ketika dalam percakapan terjadi 'pause' (jeda bicara) yang panjang, beda halnya dengan kebanyakan orang Amerika. Kelima fenomena penggunaan bahasa orang Jepang ini menunjukkan ciri-ciri strategi kesantunan positif dalam komunikasi verbal orang Jepang. Penelitian dari Shigimitsu, Murata, dan Otsuka ini berjudul "*Positive Politeness Strategies in Everyday Japanese Conversation*".

Karafoti (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "*Politeness, Gender, and the Face of the Speaker*" meneliti fenomena kesantunan dari perspektif subjek

percakapan, dengan menekankan aspek yang terabaikan atas proteksi muka penutur sendiri. Fenomena kesantunan yang diteliti adalah pujian dan respon atau jawabannya yang terjadi pada penutur bahasa Yunani dalam situasi percakapan antar teman dan saudara sekeluarga (relative). Penelitian ini mengungkap bahwa secara umum penutur bahasa Yunani perempuan menerima pujian dengan cara tertawa/tersenyum, menggunakan tuturan penanda setuju, menerima dengan sikap merendah, dan menggunakan *back-channel*. Sementara untuk penutur bahasa Yunani pria cenderung merespon pujian dengan cara melebih-lebihkan diri sendiri.

Cheung (2009) membuat penelitian tentang strategi kesantunan yang terbentuk melalui persepsi budaya yang berbeda. Penelitian tersebut berjudul *"Politeness Strategies of Chinese and American Speakers"*. Cheung meneliti tentang bagaimana dua budaya yang berbeda, Cina dan Amerika, memahami konsep kesantunan. Dua budaya yang dianggap memiliki perbedaan yang ekstrim, budaya Cina yang lebih konservatif di satu sisi, dan budaya Amerika yang lebih terbuka. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa nilai dan sikap dari budaya Cina dan Amerika adalah tidak sama atau berbeda dalam memandang memandang muka/muka pelaku tutur, apa yang dianggap dapat menjaga muka dalam budaya Cina sering dipahami sebagai mengancam muka menurut budaya Amerika, begitu pula sebaliknya. Bahkan, meskipun ketika orang-orang dari kedua budaya yang berbeda ini mempunyai maksud/tujuan yang baik dengan cara menunjukkan kesantunannya selama berinteraksi, beresiko bisa berubah menjadi hal yang tidak menyenangkan.

Prayitno (2009) meneliti tentang *"Perilaku Tindak Tutur Berbahasa Pemimpin Dalam Wacana Rapat Dinas: Kajian Pragmatik Dengan Pendekatan Gender"*. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perbedaan karakteristik penggunaan bahasa secara pragmatik dengan menggunakan pendekatan gender. Sedangkan tujuan spesifiknya adalah untuk mendeskripsikan bentuk ujaran bahasa antara pimpinan laki-laki dan perempuan dalam pertemuan resmi Pemerintah Kota Madya Surakarta. Dari penelitian studi kasus bermetode kualitatif ini ditemukan bahwa ujaran yang diucapkan oleh pimpinan perempuan dalam pertemuan-pertemuan resmi cenderung bersifat ekspresif, simpatik, dan rogatif (bersifat nyanyian) sedangkan ujaran pimpinan laki-laki cenderung bersifat direktif. Dalam hal tindak tutur direktif dijumpai bahwa penutur pimpinan perempuan cenderung menggunakan sub tindak tutur harapan dan

permohonan. Sedangkan penutur pimpinan laki-laki cenderung menggunakan sub tindak tutur direktif seperti permintaan, permintaan dengan sangat, tuntutan, anjuran, perintah, dan larangan. Dan tindak tutur direktif tersebut dilakukan secara langsung dan literal sehingga cenderung kompetitif dan konfrontatif.

Mukhamdanah (2011) menyoroti tentang kesantunan berbahasa ketika menyampaikan penolakan yang dilakukan oleh penutur beretnis Jawa dengan judul *“Realisasi Kesantunan Berbahasa Pada Etnik Jawa Saat Menyampaikan Penolakan”*. Latar belakang penelitian dilandasi asumsi bahwa sebagai daerah metropolitan, Jakarta menimbulkan perilaku masyarakat yang cenderung tidak peduli atau tidak toleran terhadap orang lain yang hal ini akan berakibat pada mudarnya tingkat kesantunan seseorang ketika menyatakan penolakan.

Penelitian Mukhamdanah ini menyoroti bentuk kesantunan menolak dari responden berdasarkan faktor jenis kelamin, kekuasaan relatif, dan tingkat imposisi. Dari penelitian ini terungkap bahwa secara umum baik responden laki-laki maupun perempuan cenderung menuturkan secara tidak langsung ketika menyatakan penolakan untuk melakukan sesuatu kepada orang yang lebih tua usianya. Namun ketika responden memberikan bentuk penolakan kepada atasannya, hal itu dilakukan dengan cara menawarkan pilihan/alternatif, jadi berbeda dengan bentuk penolakan yang ditujukan kepada orang yang lebih tua.

Ambuyo, Indede, dan Karanja (2011) meneliti kesantunan yang dilakukan anggota Parlemen Kenya dalam konteks politik dalam sesi tanya jawab pada peristiwa diskusi di Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat Kenya, Afrika. Penelitian ini berjudul *“FaceThreatening Acts and Standing Orders: ‘Politeness’ or ‘Politics’ in the Question Time Discussions of the Kenyan Parliament”*. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada strategi-strategi tertentu yang digunakan oleh anggota parlemen untuk mengurangi tindak mengancam muka (FTA) guna meningkatkan komunikasi yang efektif; strategi itu adalah dengan menggunakan tuturan-tuturan yang mengandung humor yang dianggap sebagai cara yang konstruktif meredam konflik dan mengakhiri perbedaan pendapat dalam percakapan. Strategi kesantunan lainnya digunakan sebagai bentuk tuturan ritual yang sesuai dengan Tata Tertib Parlemen Kenya yaitu mengatur perilaku dan bahasa yang bisa diterima di Parlemen Kenya.

David, Hei, dan DeAlwis (2012) menyoroti strategi kesantunan berbahasa dalam membuka dan menutup interaksi yang dilakukan oleh staff layanan publik *Post Office* dan *Employee Provident Funds (EPF)* dan masyarakat (sebagai pelanggan) di daerah urban Klang Valley, Malaysia. Penelitian ini menemukan bahwa para staf dari kedua kantor itu dan masyarakat yang datang ke kedua kantor itu hampir tidak pernah menggunakan tuturan-tuturan *phatic* ketika kedua belah pihak tersebut saling memulai/membuka dan mengakhiri/menutup percakapan. Penelitian ini berjudul “*Politeness Strategies in Openings and Closings of Service Encounters in Two Malaysian Agencies*”.

Phisghadam dan Navari (2012), dalam penelitiannya yang diberi judul “*A Study into Politeness Strategies and Politeness Markers in Advertisements as Persuasive Tools*”, menyoroti pemakaian bahasa Persi dalam iklan yang terdapat dalam majalah-majalah dari genre yang beragam dan populer di Iran. Mereka, dalam penelitian ini, mengungkap bahwa iklan yang berbahasa Persi banyak menggunakan strategi kesantunan positif dan *off-record* (tidak langsung) daripada kesantunan negatif dan *bold-on record* (langsung). Sedangkan iklan yang berbahasa Inggris banyak menggunakan strategi kesantunan positif dan *bald-on record* (langsung). Strategi *off-record* (tidak langsung) yang dijumpai berupa *giving hints* (memberikan asosiasi atau analogi), *contradictions* (menggunakan gaya ironi, metafor, dan pertanyaan retorik), *overstating* dan *understating* (menggunakan tautologi), dan *being vague*. Sementara strategi *bald-on record* yang digunakan adalah tuturan *disagreement* (ketidaksetujuan), *advice* (saran langsung), *request* (permohonan), dan *warning/threatening* (peringatan/ancaman), dan *imperative* (perintah langsung).

Normiani dan Sabhan (2013) membuat penelitian yang diberi judul “*Kesantunan Berbahasa Banjar dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kelua Kabupaten Tabalong*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesantunan berbahasa Banjar dalam transaksi jual beli dan mendeskripsikan wujud, strategi, dan fungsi kesantunan berbahasa Banjar dalam interaksi jual beli. Penelitian ini mengungkap bahwa bentuk kesantunan positif dan negatif berbahasa Banjar dalam transaksi jual beli di Pasar Kelua umumnya berupa tuturan deklaratif, imperatif, dan interogatif. Temuan lainnya adalah berkaitan dengan strategi-strategi kesantunan dan fungsi-fungsi kesantunan berbahasa Banjar. Secara umum terungkap tiga jenis strategi kesantunan berbahasa banjar yaitu

strategi kesantunan positif, negatif dan off-record yang digunakan dalam proses transaksi jual beli di Pasar Kelua. Sedangkan fungsi-fungsi kesantunan berbahasa Banjar yang dijumpai adalah fungsi menanyakan, menyatakan, dan menjawab yang dilakukan oleh penutur. Pada mitra tutur dijumpai fungsi menjawab dengan menolak dan fungsi menjawab dengan menerima.

Suparno (2014) dalam disertasinya yang berjudul *“Tindak Tutur Direktif Guru di Kelas Mata Pelajaran Bahasa Inggris (Penelitian Etnografik di SMA Negeri Surakarta)”* menemukan tiga hal yang berkaitan dengan tindak tutur direktif guru di kelas mata pelajaran Bahasa Inggris. Ketiga temuan tersebut mencakup: (1) memanfaatkan variabilitas bentuk linguistik dan daya ilokusioner ungkapan direktif dalam mendorong melakukan kegiatan belajar, (2) menggunakan beberapa jenis tuturan direktif untuk (a) menghargai siswa, (b) memfasilitasi kegiatan belajar siswa, (c) menggerakkan kegiatan belajar siswa, serta (d) menjaga kualitas input, dan (3) merealisasikan implementasi prinsip kesantunan di dalam menggunakan tuturkean direktif dengan (a) tawaran dan permintaan untuk memaksimalkan keuntungan siswa, (b) ajakan dan permintaan untuk meminimalkan keuntungan diri, (c) pujian untuk memaksimalkan pujian pada siswa, (d) memuji siswa untuk meminimalkan pujian pada diri, (e) ungkapan solidaritas untuk memaksimalkan persetujuan dengan siswa, dan (f) sapaan akrab untuk memaksimalkan simpati pada siswa.

Gunawan (2014) meneliti *Representasi Kesantunan Brown dan Levinson dalam Wacana Akademik*, penelitian ini menyoroti penggunaan kesantunan positif dan negatif yang terjadi dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa di STAIN Kendari. Hasil penelitian menunjukkan dalam wacana akademik, terdapat empat strategi kesantunan negatif yang digunakan oleh penutur yaitu (1) penggunaan tuturan tidak langsung, (2) penggunaan tuturan yang penuh kehati-hatian, (3) penggunaan tuturan hormat, dan (4) penggunaan tuturan meminta maaf. Penggunaan strategi kesantunan negatif difungsikan untuk menjaga muka negatif yang maksudnya adalah untuk mengurangi kadar tekanan atau memperlunak maksud ujaran. Sementara pada kesantunan positif juga terdapat empat strategi yang digunakan penutur yaitu (1) penggunaan identitas kelompok, (2) penggunaan basa-basi dan presuposisi, (3) penggunaan penawaran dan janji, dan (4) penggunaan memberi pertanyaan atau alasan. Penggunaan strategi kesantunan difungsikan untuk menjaga muka positif yang dimaksudkan untuk menjaga kedekatan

jarak atau hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur demi keberlangsungan interaksi.

B. Kajian Teori

1. Pragmatik

Istilah ‘pragmatik’ pertama kali dikenalkan oleh seorang filosof yang bernama Charles Morris (1938), ketika ia membicarakan bentuk umum ilmu tanda (*semiotic*). Pragmatik adalah kajian tentang hubungan tanda dengan orang yang menginterpretasikan tanda itu (Morris, 1938: dalam Levinson, 1983: 1). Batasan pragmatik juga dikemukakan oleh para ahli yang lain. Misalnya Yule (1996: 3), yang menyebutkan empat definisi pragmatik, yaitu (1) bidang yang mengkaji makna pembicara; (2) bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya; (3) bidang yang, melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara; dan (4) bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Thomas (1995: 2) menyebutkan bahwa pragmatik terbagi menjadi dua bagian, pertama, dengan menggunakan sudut pandang sosial, menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara (*speaker meaning*); dan kedua, dengan menggunakan sudut pandang kognitif, menghubungkan pragmatik dengan interpretasi/pemaknaan tuturan (*utterance interpretation*). Selanjutnya Thomas (1995: 22), yang menyatakan bahwa pemaknaan merupakan proses dinamis yang melibatkan negosiasi antara pembicara dan pendengar serta antara konteks tuturan (fisik, sosial, dan linguistik) dan makna potensial yang mungkin dari sebuah tuturan, mendefinisikan pragmatik sebagai bidang yang mengkaji makna dalam interaksi (*meaning in interaction*).

Geoffrey Leech (1993: 8) menyatakan bahwa pragmatik adalah ilmu tentang maksud dalam hubungannya dengan situasi-situasi tuturan (*speech situation*). Proses tindak tutur ditentukan oleh konteks yang menyertai sebuah tuturan tersebut. Dalam hal ini Leech menyebutnya dengan aspek-aspek situasi tutur, antara lain : pertama, yang menyapa (penyapa) dan yang disapa (pesapa); kedua, konteks sebuah tuturan; ketiga, tujuan sebuah tuturan; keempat, tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan tindak tutur (*speech act*); dan kelima, tuturan sebagai hasil tindak verbal (Leech, 1993: 19-20).

Dalam bukunya yang berjudul *Pragmatics*, Levinson memberikan beberapa batasan pragmatik antara lain seperti dalam kutipan berikut: *Pragmatics is the study of all those aspects of meaning not captured in a semantic theory* (1983:12) 'Pragmatik adalah kajian aspek-aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik'. Kutipan ini memberikan pengertian bahwa, pragmatik mengkaji makna satuan lingual secara eksternal sedangkan semantik mengkaji makna satuan lingual secara internal atau memandang bahasa menurut makna leksikal yang terpisah dari situasi dan konteks.

Levinson juga mengungkapkan bahwa : “ *Pragmatics is the study of relations between language and context that are basic to an account of language understanding* (1983: 21).” ‘Pragmatik adalah studi hubungan antara bahasa dengan konteksnya (luar bahasa) yang merupakan dasar pertimbangan memahami bahasa yang digunakan oleh penutur’. Dalam batasan ini mengandung pengertian bahwa konteks digunakan untuk mengacu pada pemahaman antara penutur dengan mitra tutur tentang pengetahuan, pengalaman, persoalan yang dipraanggapkan, situasi, waktu, tempat dan peristiwa. Dengan kata lain, semua latar belakang yang berkaitan dengan pengetahuan penutur dan mitra tutur.

Mengacu pada batasan - batasan mengenai pragmatik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pragmatik, sebagai bagian dari bidang linguistik, mengacu pada cara bahasa dipergunakan dalam komunikasi, dan bukan pada struktur bahasa (Tarjana,2010:2), dan penggunaan bahasa untuk komunikasi perlu memperhatikan konteks dari wacana atau situasi pada saat bahasa itu dipergunakan (Tarjana,2010:3).

2. Teori Kesantunan Berbahasa

Konsep kesantunan dalam berbahasa menjadi salah satu unsur yang penting dalam kajian pragmatik. Hal ini dikarenakan ketika seseorang/penutur berinteraksi dengan orang lain/mitra tutur, langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak, dipengaruhi oleh, antara lain, pandangan hidup tentang dunia (world view), nilai-nilai tradisi atau budaya, nilai-nilai keagamaan, dan lain-lain. Argumen ini sejalan dengan pandangan dari Matsumoto (2004:263) yang menyatakan bahwa: “*culture and language are intimately related ; culture influences the structure and functional use of language, and language can be thought of as the result or manifestation of culture*” (budaya dan bahasa sangat

berkaitan; budaya mempengaruhi struktur dan fungsi penggunaan bahasa, dan bahasa dapat dianggap sebagai hasil atau manifestasi budaya).

Mencermati pendapat Matsumoto tersebut, maka kesantunan dalam berbahasa merupakan produk dari budaya. Dengan demikian kesantunan dalam berbahasa tidak bisa terlepas dari aspek sosio-kultural pengguna bahasa. Dengan kata lain, kesantunan dalam berbahasa diatur oleh norma-norma dan moralitas masyarakat, yang diinternalisasikan dalam konteks budaya dan kearifan lokal.

Pada bagian berikut ini dibahas tentang konsep kesantunan menurut beberapa ahli bahasa yaitu Lakoff (1972), Brown dan Levinson (1987), dan Lecch (1983), dan Asim Gunarwan (2002).

a. Kesantunan dari Lakoff

Robin Lakoff (1973) dianggap sebagai salah satu dari beberapa linguist yang pertama-tama mengkaji kesantunan dan melahirkan suatu gagasan yang menyatakan bahwa kesantunan merupakan suatu aspek penting dalam interaksi atau komunikasi yang perlu dipelajari. Teori kesantunan dari Lakoff menyarankan bahwa seseorang mengikuti aturan-aturan tertentu ketika dia berinteraksi dengan orang lain, yang aturan – aturan tersebut untuk mencegah terjadinya ketidaklancaran interaksi (Johnstone, 2008). Lakoff (1973:298) pada mulanya mengusulkan tiga prinsip kesantunan dalam tiga maksim yaitu :

1. Jangan memaksa/menela/mengganggu (*Don't impose*)
2. Memberikan pilihan-pilihan (*Give options*)
3. Buat orang lain/mitra tutur merasa nyaman (*Make the others feel good*)

Dan dalam perkembangannya Lakoff (1990) mengkombinasikan tiga prinsip kesantunannya dengan prinsip kerjasama dari Grice (1978), yang terdiri dari empat maksim yaitu *maksim kualitas*, *maksim kuantitas*, *maksim relevans*, dan *maksim cara*, menggagas menjadi suatu kaidah kesantunan tersendiri. Kaidah kesantunan, *rules of politeness*, yang digagas oleh Lakoff tersebut terdiri dari dua yaitu :

1. Tuturan disampaikan secara jelas (*Be clear*_merujuk pada Maksim Prinsip Kerjasama dari Grice) :
 - a) Maksim Kuantitas: menyampaikan informasi sebanyak yang diperlukan ketika berinteraksi, jangan berlebih dan juga jangan kurang.

- b) Maksim Kualitas : mengatakan sesuatu yang diyakini kebenarannya berdasar pada ilmu pengetahuan dan bukti-bukti.
 - c) Maksim Relevan: mengungkapkan informasi yang relevan/berhubungan dengan topik percakapan/interaksi.
 - d) Maksim Cara : informasi disampaikan dengan ringkas, tidak ambigu/taksa
2. Tuturan disampaikan secara santun (*Be polite*) yang mencakup
- a) Jangan memaksa/menyela/ mengganggu (*Don't impose*)
 - b) Memberikan pilihan-pilihan (*Give options*)
 - c) Buat orang lain/mitra tutur merasa nyaman (*Make the others feel good*).

b. Kesantunan dari Brown and Levinson

Konsep kesantunan dari Brown and Levinson (1987) merupakan pengembangan dari gagasan Goffman (1959) tentang pengertian *muka* dan perluasan kaidah kesantunan dari Lakoff (1973). Bagi Brown dan Levinson, pengertian *muka* dibedakan menjadi dua macam *muka* yang merefleksikan dua keinginan yang berbeda yang terjadi dalam proses interaksi. Kedua macam *muka* tersebut adalah *muka positif* dan *muka negatif*, baik milik penutur maupun mitra tutur. Pengertian *muka* yang dimaksud disini bukan dalam arti rupa fisik tetapi 'public image' atau 'harga diri' menurut pandangan masyarakat umum.

Muka positif menunjukkan keinginan atau harapan penutur untuk memperoleh dukungan/kesepakatan dari mitra tutur (desire to have one's contributions approved of). Sedangkan yang dimaksud dengan *muka negatif* adalah keinginan untuk mengungkapkan gagasan tanpa ada resistensi / beban atau gangguan (desire to express one's ideas without resistance). Dengan pemahaman yang identik tentang *muka*, Aziz menegaskan bahwa *muka positif* berkaitan dengan nilai solidaritas, ketakformalan, pengakuan, dan kebersamaan; *muka negatif* mengacu pada keinginan seseorang untuk tetap mandiri, bebas dari intervensi pihak luar, dan adanya penghormatan pihak luar terhadap kemadiriannya tersebut (2008:2).

Brown dan Levinson beranggapan bahwa *muka* harus terus menerus dimonitor karena bersifat mudah mendapat kecaman/ancaman. Ketika suatu interaksi atau percakapan berlangsung, *muka* bisa hilang, dipertahankan ataupun ditingkatkan nilai-nilainya. Dalam berinteraksi penting untuk tidak hanya menjaga *muka sendiri* tetapi

juga *muka orang lain*. Penutur harus dapat menyelamatkan muka saat dihadapkan dengan tindak mengancam muka –*face threatening act* (FTA)– yang mengancam muka mitra tutur (Johnstone, 2008).

Berdasarkan pada konsep muka dari Brown dan Levinson tersebut, maka muka memiliki nilai-nilai tertentu yang patut untuk dijaga salah satu caranya adalah melalui pola berbahasa yang santun, yang tidak merusak nilai-nilai muka itu (Aziz, 2008). Pola berbahasa yang santun tersebut oleh Brown dan Levinson digagas menjadi suatu strategi kesantunan berbahasa yang dapat digunakan oleh penutur ketika menjumpai tindak mengancam muka (*face-threatening act*). Strategi kesantunan berbahasa dari Brown dan Levinson tersebut meliputi lima macam strategi yaitu:

1. *On Record* : melakukan tindak tutur apa adanya, tanpa basa-basi
2. Melakukan tindak tutur dengan menggunakan kesantunan positif
3. Melakukan tindak tutur dengan menggunakan kesantunan negatif.
4. *Off the record* : melakukan tindak tutur tidak langsung yang non konvensional
5. Tidak melakukan tindak mengancam muka (FTA) atau diam.

Pada kesantunan positif Brown dan Levinson (dalam Goody, 1987:101-129) memunculkan gagasan berupa lima belas strategi melakukan kesantunan positif. Kelimabelas strategi kesantunan positif tersebut mencakup: (1) *notice, attend to Hearer (his/her interests, wants, needs, goods)* ‘memperhatikan aspek kondisi pendengar (kesukaan, keinginan, kebutuhan, dan properti)’, (2) *exaggerate (interest, approval, sympathy with Hearer)* ‘membesar-besarkan/melebih-lebihkan (kesukaan, persetujuan, simpati kepada pendengar)’, (3) *intensify interest to Hearer* ‘mempersangat perhatian pendengar dengan mendramatisir sesuatu’, (4) *use in-group identity markers* ‘menggunakan penanda identitas kelompok’, (5) mencari kesepakatan/kecocokan/kesepahaman’, (6) *avoid disagreement* ‘menghindari ketidaksepahaman (berpura-pura setuju/kesepahaman semu, menipu untuk kebaikan, menggunakan kata berpagar)’, (7) *presuppose/raise/assert common ground* ‘menyatakan alasan yang dianggap memiliki kesamaan dengan berbahasa-basi dan praanggapan’, (8) *joke* ‘bercanda/melucu’, (9) *assert or presuppose Speaker’s knowledge of and concern for H’s wants* ‘menyatakan memahami keinginan pendengar’, (10) *offer, promise* ‘memberi tawaran atau janji’, (11) *be optimistic* ‘mengembangkan sikap optimis’, (12) *include both Speaker and Hearer in the activity*

‘memasukkan pendengar ke dalam aktivitas penutur’, (13) *give (or ask for) reason* ‘memberi pertanyaan atau meminta alasan’, (14) *assume or assert reciprocity* ‘memberikan pernyataan hubungan timbal balik’, dan (15) *give gifts to hearer* ‘memberi penghargaan kepada pendengar’.

Selanjutnya pada kesantunan negatif, Brow dan Levinson (dalam Goody, 1987:132-210) menyatakan terdapat sepuluh strategi melakukan kesantunan negatif. Kesepuluh strategi yang dimaksud adalah (1) *be conventionally indirect* ‘menyatakan tuturan secara tidak langsung’, (2) *question, hedge* ‘menggunakan tuturan bertanya atau berpagar’, (3) *be pessimistic* ‘menunjukkan sikap pesimis’, (4) *minimize the imposition* ‘meminimalkan paksaan/tekanan’, (5) *give deference* ‘memberi penghormatan’, (6) *apologize* ‘meminta maaf’, (7) *impersonalize S and H* ‘menggunakan bentuk impersonal’, (8) *state the FTA as general rule* ‘menyatakan tindak mengancam muka sebagai kaidah umum’, (9) *nominalize* ‘mengubah kata tertentu menjadi kata benda’, dan (10) *go on record as incurring a debt, or as not indebted H* ‘menggunakan tuturan berhutang budi’.

Kemudian Brown dan Levinson menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor non-linguistik atau faktor sosial yang turut mempengaruhi seorang penutur dalam upayanya bertindak tutur secara santun. Ketiga faktor tersebut adalah *Relative Power* (Kekuasaan) penutur dengan mitra tutur; *Social Distance* (Jarak sosial) antara penutur dengan mitra tutur; dan *Degree of Imposition* (Tingkat pembebanan) suatu tindakan.

c. Kesantunan dari Leech

Teori kesantunan dari Leech ditunjukkan dalam bagian retorika interpersonal yang meliputi tiga prinsip yaitu prinsip kerjasama Grice, prinsip sopan santun, dan prinsip ironi (Leech, 2011:24). Prinsip kesantunan Leech merupakan pengembangan dari prinsip kerjasama Grice (Archer, 2012:88). Leech (1983) menyebutkan bahwa dalam berinteraksi, para pelaku mempertimbangkan prinsip kesantunan yang diuraikan dalam maksim-maksim kesantunan yaitu:

1. Maksim Kebijaksanaan (*Tact Maxim*)

Maksim ini kebanyakan diaplikasikan dalam tindak tutur direktif dan komisif. Maksim ini berusaha memaksimalkan keuntungan bagi mitra tutur dan meminimalisir kerugian mitra tutur. Semakin tuturan itu memberikan keuntungan terhadap mitra tutur,

maka tuturan itu semakin santun. Pelaksanaan maksim kebijaksanaan dapat dilihat pada contoh tuturan yang terjadi dalam interaksi lewat telepon antara seorang redaktur surat kabar dengan seorang penulis artikel berikut ini.

Redaktur : “Silahkan kirim artikelnya, bisa lewat e-mail atau langsung antar ke sini”

Penulis : “Baik, saya akan langsung antar saja ke sana. Terima kasih.”

Di dalam tuturan tersebut, tampak jelas bahwa apa yang dituturkan sang redaktur (penutur) memang memaksimalkan keuntungan sang penulis artikel (mitra tutur). Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif yang memberikan keuntungan terhadap mitra tutur karena dia bisa menentukan pilihan cara untuk mengirim artikel ke surat kabar. Semakin dimungkinkan mitra tutur melakukan pilihan, maka semakin santun tuturan tersebut

2. Maksim Kedermawanan/Kebaikan hati (*Generosity Maxim*)

Maksim ini meminimalisir keuntungan penutur dan memaksimalkan kerugian penutur. Dengan Maksim kedermawanan atau maksim kebaikan hati, para peserta interaksi diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Pelaksanaan maksim kedermawanan dapat dilihat pada contoh tuturan yang terjadi antara dua orang teman sekantor berikut ini.

Didik : “Ayo pak Hari, saya bantu menyelesaikan laporan bulanannya”

Hari : “Tidak usah pak Didik, ini cuma kurang sedikit kok”

Dari tuturan-tuturan tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa Didik berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan untuk menyelesaikan laporan bulanan yang sedang dikerjakan oleh Hari.

3. Maksim Penghargaan/Pujian (*Approbation Maxim*)

Maksim ini meminimalkan pujian penutur tetapi memaksimalkan pujian kepada mitra tutur. Di dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa seseorang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain/mitra tutur. Maksim ini bertujuan agar para peserta interaksi tidak saling menjelekkkan/mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Peserta interaksi yang sering merendahkan peserta interaksi yang lain di dalam kegiatan

komunikasi akan dianggap sebagai orang yang tidak santun. Dikatakan demikian karena tindakan merendahkan tersebut merupakan tindakan tidak menghargai orang lain. Pelaksanaan maksim penghargaan bisa dijumpai pada contoh tuturan-tuturan yang terjadi antara dua orang teman sekerja, Bagas dan Alim, berikut.

Bagas : “Alim, aku ditunjuk perusahaan untuk membuka kantor cabang di Batam.”

Alim : “Wah hebat kamu, Gas. Perusahaan memberi kepercayaan kepadamu. Selamat...selamat...”

Informasi yang disampaikan Bagas kepada Alim pada contoh di atas ditanggapi dengan sangat baik oleh Alim, ini ditunjukkan dengan pujian yang diberikan kepada Bagas.

3. Maksim Kerendahhatian (*Modesty maxim*)

Di dalam maksim kerendahhatian ini, peserta interaksi diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara meminimalisir pujian terhadap dirinya sendiri. Orang akan dianggap angkuh, sombong atau congkak jika di dalam kegiatan bertutur selalu memuji dan mengunggulkan dirinya sendiri. Pelaksanaan maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati dapat dilihat pada contoh tuturan yang terjadi antara dua orang dalam suatu acara sarasehan yang baru saja selesai, satu sebagai pengisi acara/penceramah dan satu yang lain adalah moderator.

Moderator : “Pak Jodi, isi ceramah dan cara penyampiannya bagus banget.”

Penceramah: ”Wah, sanjungan pak Tri terlalu berlebihan”

Dalam contoh di atas si penceramah tidak menjawab dengan: “Ya seperti itulah kelebihan saya.” Pak Jodi selaku penceramah mengurangi sanjungan atau pujian terhadap dirinya sendiri dengan mengatakan: ” Wah, sanjungan pak Tri terlalu berlebihan.” Meminimalkan pujian pada diri sendiri dan memaksimalkan kejelekan diri merupakan ciri dari maksim kerendahhatian.

5. Maksim Kesepakatan (*Agreement Maxim*)

Maksim ini berusaha memaksimalkan kesepakatan terhadap mitra tutur dan meminimalkan ketidaksepakatan terhadap mitra tutur. Di dalam maksim ini, diharapkan para peserta interaksi dapat saling membangun kesepakatan atau kecocokan di dalam kegiatan bertutur. Jika terjadi kesepakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, maka masing-masing dari mereka bisa dianggap bersikap

santun. Realisasi maksim kesepakatan/kecocokan dapat dilihat pada contoh tuturan yang terjadi antara dua orang dosen disaat istirahat berikut ini.

Dosen A : "Sepertinya dalam pemilu 2014 mendatang, rakyat memilih presiden dan wapres lebih melihat pada aspek figur individu bukan asal usul partainya."

Dosen B : "Saya sependapat pak. Ketika pemilihan anggota DPR pun, rakyat juga akan lebih mempertimbangkan aspek figur bukan asal partainya. Ini berarti rakyat makin rasional dalam memilih."

Pada contoh di atas, tampak menunjukkan adanya kesepatan/ kecocokan persepsi antara Dosen A dan B tentang aspek figur sebagai pertimbangan dalam memilih presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014 yang akan datang. Dosen B menyatakan kesepakatannya atas pernyataan Dosen A tentang aspek figur sebagai pertimbangan utama masyarakat dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.

6. Maksim Simpati (*Sympathy Maxim*)

Maksud dari maksim ini adalah memaksimalkan simpati terhadap mitra tutur dan meminimalkan ungkapan antipati terhadap mitra tutur. Maksim ini diungkapkan dengan tuturan asertif dan ekspresif. Di dalam maksim simpati ini, diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Jika mitra tutur mendapatkan kesenangan, kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Bila mitra tutur mengalami kesedihan, kekesusahan, kesulitan atau musibah penutur hendaknya turut merasa mengalami kesedihan atau musibah atau mengungkapkan rasa sedihnya sebagai wujud simpati. Sikap antipati kepada salah satu peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan yang tidak santun. Pelaksanaan maksim simpati dapat dilihat pada contoh tuturan antara dua orang sahabat yang sedang bercakap-cakap di saat berikut ini.

Laras : "Dini, sorry banget kemarin tidak jadi ke kampus bareng-bareng. Aku harus ngantar ayahku ke rumah sakit."

Dini : "Ayahmu sakit lagi Ras? Wah, ikut prihatin ya, semoga cepat kembali sehat."

Contoh tuturan dari Dini: *Wah, ikut prihatin ya, semoga cepat kembali sehat* menunjukkan simpati Dini kepada temannya Laras. Dengan kata lain Dini melakukan sikap yang santun dalam bertutur.

d. Kesantunan dari Asim Gunarwan

Kesantunan yang digagas oleh Asim Gunarwan diilhami oleh prinsip kerjasama dari Grice (1975) dan prinsip kesantunan dari Leech (1981) dan dibangun atas dasar nilai-nilai budaya Jawa (Gunarwan, 2007b:104-105) yaitu (1) menjaga kerukunan,(2) menghormati orang lain, (3) rendah hati,(4) sadar tempat dan kedudukan/pangkat,(5) sadar perasaan orang lain,(6) berani mengalah,(7) bersabar bila dimarahi,(8) kaya batin lebih utama dari pada kaya lahir, (9) berperilaku santun, dan (10) berkata tidak langsung lebih utama daripada berterus terang. Selanjutnya nilai-nilai budaya Jawa ini dirumuskan oleh Asim Gunarwan menjadi satu prinsip perilaku berbahasa yang disebut prinsip kerukunan orang Jawa (2007:229). Prinsip kerukunan ini merupakan manifestasi dari pandangan hidup orang Jawa yang mengedepankan keseimbangan antara jagad besar (makro kosmos) dan jagad kecil (mikro kosmos).

Prinsip kerukunan tersebut oleh Asim Gunarwan dijabarkan menjadi empat maksim (2007e: 229) yaitu :

- (1) maksim *kurmat* 'hormat'
- (2) maksim *andhap asor* 'rendah hati'
- (3) maksim *empan papan* 'sadar tempat kedudukan'
- (4) maksim *tepa slira* 'tenggang rasa'.

Maksim hormat mengandung nasihat agar orang selalu menunjukkan hormat kepada orang lain, sesuai dengan kedudukan masing-masing menurut tingkatan sosial yang berlaku di dalam masyarakat (Gunarwan, 2007c:171). Sub-maksim *kurmat* yaitu (1) jangan menggunakan bahasa yang membuat mitra tutur merasa tidak ditempatkan sebagaimana mestinya, (2) menggunakan tingkat tutur , bila perlu memakai honorifik, sesuai dengan kedudukan atau jarak sosial mitra tutur (Gunarwan,2007c:171-172).

Maksim rendah hati mengandung nasihat agar orang selalu berperilaku rendah hati, tidak, congkak, tidak tinggi hati, dsb (Gunarwan,2007c:172). Sub-maksim rendah hati adalah (1) menggunakan bahasa sedemikian rupa sehingga mitra tutur merasa bahwa ia dipuji, (2) tidak menggunakan honorifik untuk mengacu pada diri sendiri.

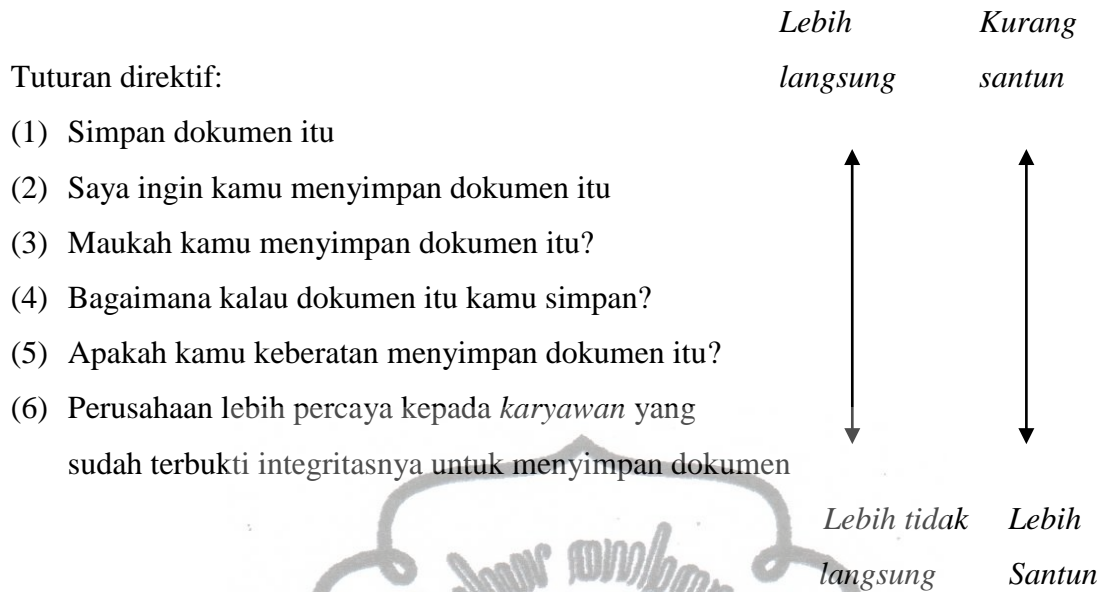
Maksim sadar tempat kedudukan (empan papan) berisi nasihat agar kita bisa selalu menyadari tempat atau kedudukan kita di dalam masyarakat yang kita adalah sebagai anggotanya (Gunarwan,2007:172). Dengan menyadari tempat kedudukan kita saat berinteraksi maka memungkinkan adanya keseimbangan komunikasi.

Maksim tenggang rasa (*tepa slira*) memiliki maksud agar kita mampu mengukur tubuh sendiri (2007:172). Dalam praktek berbahasa, maka kita sebaiknya tidak menggunakan bahasa yang tidak pantas kepada orang lain, sebagaimana kita tidak mau orang lain menggunakan bahasa yang tidak pantas kepada kita. Sub-maksim tenggang rasa adalah (1) gunakanlah bahasa yang patut kepada orang lain sebagaimana kita mau orang lain menggunakan bahasa yang patut kepada kita, dan (2) hindari penggunaan bahasa yang tidak patut.

3. Skala Ketidaklangsungan sebagai Parameter Kesantunan Berbahasa

Untuk mengetahui derajat, tingkatan, atau kadar suatu tuturan direktif terdapat media ukur yang bisa digunakan sebagai acuan dalam penelitian kesantunan berbahasa. Leech menggagas lima media ukur kesantunan yaitu (1) *Cost-benefit scale* 'Skala Untung-Rugi', (2) *Optionality Scale* 'Skala Pilihan', (3) *Indirectness Scale* 'Skala Ketidaklangsungan', (4) *Authority Scale* 'Skala Otoritas/Kekuasaan', dan (5) *Social Distance Scale* 'Skala Jarak Sosial' (Rahardi,2005:66). Dari lima media ukur tersebut, *Indirectness Scale* 'Skala Ketidaklangsungan' digunakan oleh penulis untuk mengetahui derajat kesantunan tuturan direktif pada penelitian ini. Pertimbangannya adalah tuturan direktif yang memiliki dua bentuk struktural, direktif langsung dan direktif tidak langsung, mudah dikenali melalui bentuk dan fungsi tuturannya. Skala ini merujuk pada derajat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan direktif itu bersifat langsung, maka dianggap semakin tidak santun tuturan tersebut. Dan sebaliknya, semakin tidak langsung maksud sebuah tuturan, maka akan dianggap semakin santun tuturan itu.

Untuk memperoleh gambaran yang praktis, berikut ini ditunjukkan ilustrasi derajat tuturan direktif dengan parameter *indirectness scale* menurut Leech.



Gambar 2.1: Skala Ketidaklangsungan Leech

Dari gambar tersebut tampak bahwa semakin tidak langsung tuturan ilokusi direktif, maka dianggap semakin santun tuturan itu. Begitu pula sebaliknya semakin langsung ilokusi direktif maka dianggap semakin tidak santun. Meskipun bentuk struktural tuturan mempengaruhi santun tidaknya tuturan, dalam pragmatik maksud suatu tuturan cenderung lebih dipertimbangkan. Oleh karenanya, dengan memperhatikan konteks tuturannya, tuturan direktif nomor (6) yang berbentuk deklaratif menunjukkan lebih santun daripada tuturan direktif nomor (5) yang berbentuk interogatif. Tuturan direktif nomor (2) berbentuk deklaratif sama dengan tuturan nomor (6), namun sifat kelangsungan direktifnya lebih jelas dibandingkan dengan tuturan nomor (6). Jadi tuturan nomor (2) dianggap lebih kurang santun daripada tuturan nomor (6).

4. Teori Tindak Tutur

Sebagaimana yang kita ketahui, jika kita berbicara tentang teori tindak tutur, maka ada tiga nama tokoh penting yang selalu disebut-sebut oleh pemerhati pragmatik. Mereka adalah L.Wittgenstein, John L.Austin, dan John R.Searle. Wittgenstein (1953) melalui karyanya yang berjudul *Philosophical Investigations* (Investigasi Filsafat) memunculkan konsep mengenai *Language Games* 'Permainan Bahasa'. *Language Games* adalah proses menyeluruh penggunaan kata, termasuk juga pemakaian bahasa yang sederhana sebagai suatu bentuk permainan (Mustansyir, 1987:83). *Language*

Games yang dimaksudkan Wittgenstein antara lain : memberi perintah serta mematuhi, menggambarkan penampakan suatu objek, mengarang suatu cerita dan menceritakan, bertanya, berterimakasih, mengucapkan salam, dan lain-lain (Mustansyir,1987:84).

John L. Austin, seorang berkebangsaan Inggris, pada tahun 1955 disebut-sebut sebagai penggagas teori tindak tutur melalui perkuliahan yang diberikannya. Setelah kematiannya pada tahun 1962, buku berjudul "*How to Do Things with Words*" dipublikasikan. Austin tidak memandang sebuah kalimat dari aspek filosofis, melainkan dari tuturannya yang direalisasikan melalui tindakan. John Rogers Searle adalah murid dari Austin yang kemudian mengembangkan teori tindak tutur Austin. Pada tahun 1969, Searle menulis buku berjudul "*Speech Acts*" yang didalamnya disebutkan pengembangan klasifikasi tindak tutur dari Austin.

4.1. Tindak Tutur dari Austin

Teori tindak tutur mula-mula digagas oleh J.L.Austin (1962:95) yang menyatakan bahwa: " ... *to say something is to do something*" 'mengatakan sesuatu adalah melakukan sesuatu', *or in saying something we do something* 'dalam mengatakan sesuatu pada dasarnya kita melakukan sesuatu', *or even by saying something we do something* 'atau bahkan dengan mengatakan sesuatu kita berarti melakukan sesuatu'. Pendapat Austin ini mengisyaratkan bahwa ketika seseorang mengatakan sesuatu pada hakekatnya dia sedang berusaha melakukan sesuatu dengan kata-kata atau bahasa.

Austin membedakan tindak tutur menjadi tiga yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi (1962:108). *Locutionary act* 'tindak lokusi' yaitu menuturkan suatu kalimat dengan reference (acuan) dan sense (makna dasar) tertentu. *Illocutionary act* 'tindak ilokusi' seperti *menginformasikan, memerintah, memperingatkan, menjanjikan, mengusulkan*, dsb., merupakan ujaran-ujaran yang mempunyai kekuatan tertentu. *Perlocutionary act* atau tindak perlokusi menggambarkan efek dari tindak menyatakan sesuatu/tindak ilokusi.

Selanjutnya Austin mengungkapkan bahwa berdasar daya ilokusinya terdapat lima macam jenis tindak tutur, yaitu : (1) tindak tutur verdiktif, (2) tindak tutur eksersitif (3) tindak tutur komisif, (4) tindak tutur behabitif, dan (5) tindak tutur ekspotif.

Tindak tutur verdiktif mengacu pada tindak untuk memutuskan sesuatu misalnya yang dituturkan oleh seorang hakim, juri, atau wasit. Tindak verdiktif terdapat dalam hal menyampaikan/mengungkapkan suatu temuan, bukti-bukti, atau alasan-alasan. Tuturan verdiktif mempunyai keterkaitan dengan nilai kebenaran dan kesalahan, sehingga isi tuturan verdik yang bersifat benar atau salah bisa dijumpai dalam tuturan yang dilakukan, misalnya, seorang wasit pemimpin pertandingan olah raga : ‘Keluar’ (bola), ‘Masuk’ (bola), ‘Pindah bola’, dan lain-lain.

Tindak tutur eksersitif mengacu pada tindak menggunakan/menjalankan kekuasaan, hak, atau pengaruh. Contoh ujar-tuturannya : *menunjuk, membujuk, memperingatkan, menyarankan, memesan, memaksa* dan lain-lain. Dalam praktek berbahasa misalnya tuturan ‘*Biarkan dia memakai computer itu*’. Tuturan ini logikanya hanya bisa dijalankan oleh penutur yang memiliki pengaruh tertentu. *Tindak komisif* ditandai dengan melakukan tindak berjanji atau tindak melakukan suatu usaha. Contoh tuturannya antara lain, *menjamin, bersumpah, bermaksud, merencanakan/berencana, menyetujui, menolak, bersumpah, merenung, mengusulkan, dan lain-lain*. Dalam praktek percakapan misalnya:

X : Ada film bagus, nonton yuk! (tindak eksersitif membujuk)

Y : Sebetulnya mau, tapi ini aku lagi gak enak badan (tindak komisif menolak)

Tindak tutur behabitif berkaitan dengan sikap dan perilaku sosial. Contohnya tindak memaafkan, memberi selamat, berbelas sungkawa, mengutuk, mengecam, dan menantang. Tindak behabitif ini menunjukkan suatu reaksi atas perilaku/perbuatan atau sikap seseorang. Contoh tuturannya: *minta maaf, selamat atas...., mudah-mudahan, semoga...., terima kasih, sampai jumpa, dan sebagainya*. Pemakaian tuturannya misalnya :

X : Permainan gitar anda sungguh indah (behabitif)

Y : Terima kasih (behabitif)

Tindak tutur ekspositif digunakan untuk bertindak memaparkan sesuatu yang terkait dengan mengungkapkan sesuatu secara rinci, mengungkapkan alasan-alasan tertentu, dan menjelaskan tentang pemakaian sesuatu serta menjelaskan suatu referensi. Tuturan ekspositif contohnya adalah *mendeskripsikan, mengidentifikasi, meragukan, meyakini, menyebutkan, menerima, merevisi, mengenali, menginformasikan, dan lain-lain*.

Berdasarkan macam-macam tindak tutur diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak verdiktif merupakan sebuah tindak menjalankan suatu keputusan, tindak eksersitif merupakan sebuah tindak menegaskan/menunjukkan suatu pengaruh/kekuasaan, tindak komisif menunjukkan tindak mengasumsi/menganggap suatu kewajiban atau tindak menyatakan suatu maksud, tindak behabitif merupakan tindak untuk menentukan sikap, dan tindak ekspositif adalah tindak untuk mengklarifikasi alasan, argument, dan komunikasi.

4.2. Tindak Tutur dari Searle

Sebagian besar ahli tindak tutur mengatakan bahwa klasifikasi yang disampaikan Austin terlalu abstrak dan belum memberikan taksonomi yang jelas. Searle (1975) mengatakan antara lain bahwa dalam hasil kerja Austin masih terdapat hal yang membingungkan, yaitu definisi tindak tutur yang diberikannya terlalu luas. Kemudian, dalam skema klasifikasinya terdapat kategori yang tumpang tindih, seperti tindak tutur menjelaskan pada saat yang sama merupakan bagian dari kategori berbeda, yaitu dapat digolongkan dalam *verdiktif dan ekspositif*.

Searle membagi tindak tutur menjadi empat jenis, yakni (a) tindak tuturan (*utterance act*), yaitu kegiatan menuturkan kata-kata sehingga unsur yang dituturkan berupa kata atau morfem; (b) tindak proposisional (*propositional act*), yaitu tindak menuturkan kalimat; (c) tindak ilokusi (*Illocutionary act*), yaitu tindak menuturkan kalimat, tetapi sudah disertai disertai tanggung jawab penutur untuk melakukan suatu tindakan; dan (d) tindakan perlokusi (*perlocutionary act*), yaitu tindak tutur yang menuntut mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam perkembangannya, Searle (1975) mengembangkan teori tindak tuturnya terpusat pada ilokusi. Pengembangan jenis tindak tersebut berdasarkan pada tujuan dari tindak, dari pandangan penutur. Secara garis besar pembagian Searle adalah sebagai berikut:

1. Asertif (Assertives) : pada ilokusi ini penutur terikat pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya, menyatakan, mengusulkan, membuat, mengeluh, mengemukakan pendapat, dan melaporkan.
2. Direktif (Directives): ilokusi ini bertujuan memunculkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur; misalnya, memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan memberi nasihat.

3. Komisif (Commissives): pada ilokusi ini penutur sedikit banyak terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya, menjanjikan, menawarkan. Jenis ilokusi ini cenderung berfungsi menyenangkan dan kurang bersifat kompetitif karena tidak mengacu pada kepentingan penutur, tetapi pada kepentingan petutur (mitra tutur).
4. Ekspresif (Expressive): fungsi ilokusi ini ialah mengungkap atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi, misalnya: mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, mengucapkan belasungkawa, dan sebagainya.
5. Deklarasi (Declaration): berhasilnya pelaksanaan ilokusi ini akan mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas, misalnya: mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengucilkan/membuang, mengangkat, dan sebagainya.

5. Tindak Tutur Direktif

Tindak tutur direktif seperti yang dikonsepkan oleh Searle (1975) bertujuan untuk memunculkan suatu efek atau akibat berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur. Tindak tutur direktif dari Searle ini (dalam Cutting, 2008:15) meliputi: “commanding (memerintah), requesting (memohon), inviting (mengundang/mengajak), forbidding (melarang), dan suggesting (menasihati), dll.” Tindak tutur direktif ini menunjukkan keinginan atau harapan penutur kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu (Huang:2007:107). Oleh Leech (1993:164), tindak direktif ini dapat dikategorikan sebagai tindak tutur yang bersifat kompetitif, karena membutuhkan kesantunan negatif. Kreidler (2002:189) menyatakan tindak tutur direktif berhubungan dengan tuturan yang menunjukkan upaya penutur untuk meminta mitra tutur melakukan sesuatu atau menghindar melakukan sesuatu. Sedangkan Gunarwan (2007a:27) memformulasikan tindak tutur direktif sebagai tindak tutur yang dilakukan oleh penutur untuk membuat pendengarnya melakukan sesuatu. Tindak tutur ini bisa bersifat langsung (yaitu dengan menggunakan kalimat bermodus imperatif) dan dapat juga tidak langsung (yaitu dengan menggunakan kalimat bermodus bukan imperatif).

Dilandasi oleh konsep-konsep tindak tutur direktif di atas, penulis memiliki kecenderungan menggunakan konsep tindak tutur dari Searle untuk keperluan analisis dalam penelitian ini. Pertimbangannya adalah tindak ilokusi direktif dari Searle sudah

banyak dijadikan sebagai acuan dalam kajian pragmatik oleh para peneliti terdahulu , seperti Shigimitsu, Murata, dan Otsuka (2006), Karafoti (2007), Cheung (2009), Prayitno (2009), Mukhamdanah (2011), Ambuyo, Indede, dan Karanja (2011), David, Hei, dan DeAlwis (2012), Phisghadam dan Navari (2012), , Normiani dan Sabhan (2013), Suparno (2014), dan lain-lain. Hal ini menggambarkan bahwa tindak tutur direktif dari Searle ini dianggap memiliki tingkat reliabilitas ataupun akuntabilitas yang signifikan.

6. Tindak Tutur Langsung dan Tidak Langsung

Sebuah tindak tutur bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung dan literal maupun tidak literal. Bila terdapat hubungan langsung antara bentuk struktural tuturan (deklaratif, interogatif, dan imperatif) dan fungsi komunikatif tuturan (menyatakan, bertanya, memerintah/memohon/mengajak) maka itu menunjukkan tindak tutur langsung. Dan bila tidak terdapat hubungan tidak langsung antara bentuk struktural tuturan dan fungsi komunikatif tuturan, maka itu menunjukkan tindak tutur tidak langsung (Yule, 1996:54-55). Dengan demikian sebuah tuturan deklaratif yang difungsikan untuk menyatakan sesuatu merupakan sebuah tindak tutur langsung, tetapi bila itu difungsikan untuk tindak memerintah melakukan sesuatu maka termasuk tindak tutur tidak langsung. Sebagai contoh bisa diperhatikan tuturan berikut:

- (a) Motornya kotor.
- (b) Saya minta tolong adik membersihkan motor .

Tuturan (a) berbentuk deklaratif berfungsi untuk menyatakan sesuatu atau membuat pernyataan, ini menunjukkan tindak tutur langsung. Sedangkan tuturan (b) berbentuk deklaratif berfungsi untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Namun demikian mengingat pragmatik merupakan kajian makna berdasarkan konteks maka tuturan (a) tersebut bukan hanya sekedar berfungsi untuk menyatakan sesuatu, tetapi juga berfungsi untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Jadi tuturan berbentuk deklaratif seperti pada tuturan (a) bisa menunjukkan tindak tutur tidak langsung.

Bentuk struktural tuturan yang berbeda bisa difungsikan untuk menunjukkan fungsi komunikatif yang sama yaitu bentuk tuturan interogatif dan imperatif. Tuturan interogatif bisa berfungsi untuk menanyakan sesuatu atau memohon melakukan sesuatu, tuturan berbentuk interogatif termasuk tuturan tidak langsung. Contohnya adalah:

- (c) Apakah kamu bawa penghapus?
- (d) Sudikah anda menunggu sejenak?

Tuturan (c) berbentuk interogatif berfungsi untuk menanyakan sesuatu atau membuat pertanyaan, ini termasuk tindak tutur tidak langsung. Tuturan (d) berbentuk interogatif berfungsi untuk memohon orang lain melakukan sesuatu, juga termasuk tindak tutur tidak langsung sama dengan tuturan (c). Namun demikian dalam kajian pragmatik, kajian makna berdasarkan konteks, tuturan (c) tersebut bukan hanya sekedar berfungsi untuk menanyakan sesuatu, tetapi juga berfungsi untuk meminta orang lain atau mitra tutur untuk meminjamkan sesuatu/ memberi pertolongan kepada penutur.

Tuturan berbentuk imperatif merupakan tuturan yang hanya menunjukkan tindak tutur langsung. Fungsi komunikatifnya bisa berupa memerintah, menyuruh, atau mengajak. Contohnya:

- (e) Nyalakan lampunya.
- (f) Jangan mendekat.
- (g) Mari kita pulang,

Tuturan (e) dan (f) menunjukkan bentuk tuturan imperatif, tuturan (e) berfungsi memerintah atau menyuruh mitra tutur melakukan sesuatu, tuturan (f) berfungsi menyuruh mitra tutur untuk tidak melakukan sesuatu. Dan tuturan imperatif (g) berfungsi mengajak mitra tutur melakukan sesuatu.

7. Implikatur

Kata *implikatur* berasal dari bahasa Inggris 'implicature' (nominal) yang merupakan kata jadian dari 'to imply' (verbal), dalam kamus Inggris-Indonesia 'to imply' mempunyai arti *menyatakan secara tidak langsung* (Echols, 1975: 313). Kata 'to imply' sendiri aslinya berasal dari bahasa latin *plicare* 'to fold' yang artinya adalah *membungkus/melipat*, maka dari itu sesuatu yang terbungkus/terlipat harus dibuka agar supaya bisa dimengerti (Mey, 2001: 45). Dalam sebuah peristiwa komunikasi acap kali dijumpai tuturan-tuturan yang dibuat oleh pelaku komunikasi disampaikan secara tidak langsung atau dibungkus sedemikian rupa sehingga makna tuturan-tuturan tersebut menjadi tidak kentara, tuturan-tuturan semacam itu dinamakan implikatur yang untuk memahaminya membutuhkan suatu interpretasi. Dalam pandangan Leech (1983: 30-31), *interpreting an utterance is ultimately a matter of guesswork, or (to use a more*

dignified term) *hypothesis formation* 'menafsirkan suatu tuturan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk menduga-duga, atau (menggunakan isitilah yang lebih bermartabat) membuat suatu hipotesa'.

Konsep implikatur dikenalkan oleh Grice dalam sebuah perkuliahan di Harvard pada tahun 1969, dalam perkuliahan itu dia menyampaikan pandangannya mengenai makna dan komunikasi (Huang, 2007:23). Grice, sebagaimana yang diungkap oleh Thomas (1995: 57), mengenalkan dua macam implikatur, yaitu *implikatur konvensional* dan *implikatur konversasional*. Implikatur konvensional *associated with specific words and result in additional conveyed meanings when these words are used* 'berkaitan dengan kata-kata khusus dan menimbulkan arti atau maksud tambahan bila kata-kata tersebut digunakan' (Yule, 1996:45). Contohnya, *Dia orang miskin tapi jujur*, penggunaan kata 'tapi' menunjukkan implikatur konvensional. Kata-kata lain yang menunjukkan implikatur konvensional antara lain: *actually* 'sebenarnya', *also* 'juga', *anyway* 'bagaimanapun juga', *only* 'hanya', *however* 'akan tetapi', *on the other hand* 'di sisi lain', *besides* 'lagi pula', dan lain-lain (Huang, 2007:55).

Grice membagi implikatur konversasional menjadi dua yaitu implikatur konversasional umum dan implikatur konversasional khusus (Huang, 2007:31). Implikatur konversasional umum, dalam pandangan Grice, terjadi tanpa memerlukan kondisi kontekstual tertentu, sedangkan implikatur konversasional khusus memerlukan kondisi konteks tertentu (Huang, 2007:31). Contoh tuturan implikatur konversasional umum *Dia sering lupa mengunci pintu*, untuk menginterpretasi tuturan ini tidak memerlukan konteks tertentu. Sebaliknya, dalam contoh tuturan implikatur konversasional khusus:

Namira : Kapan ya bu, ayah pulang dari Bandung?

Ibu : Kemarin ibu menelpon ayah, nadanya sibuk terus.

Untuk memahami tuturan ini memerlukan kondisi konteks tertentu, contoh tuturan tersebut menunjukkan suatu konteks bahwa sang ayah tidak ada di rumah tetapi telah sedang berada di kota Bandung selama waktu tertentu untuk suatu keperluan. Tuturan pertanyaan si anak (Namira) bermaksud mencari tahu apakah ibunya mengetahui kapan waktu kepulangan sang ayah. Namun dari tuturan jawaban *ibu*, sang *ibu* juga tidak atau belum tahu kapan sang ayah akan pulang.

8. Analisa Wacana Kritis

Analisis wacana kritis (AWK), diungkapkan oleh Purnomo dalam Puspa Ragam Bahasa dan Sastra (2006:3), merupakan penerapan wacana dengan perspektif interdisipliner. Jika *analisis wacana* hanya difokuskan pada penggunaan bahasa alamiah dengan analisis semata-mata bersifat linguistik, AWK berusaha menjelaskan penggunaan bahasa dikaitkan dengan perspektif disiplin lain seperti; politik, gender, dan faktor sosiologi yang lain.

Menurut Fairclough dan Wodak dalam Eriyanto (2005:7), AWK melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Menurut Teun A. van Dijk, Fairclough, dan Wodak, yang dikutip Eriyanto (2005:8), menyajikan karakteristik adalah hal penting dari analisis wacana kritis yang terdiri dari: pertama, tindakan (action), ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Yang kedua, konteks dari wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini dipandang diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Yang ketiga, historis yakni, memahami wacana teks bagaimana teks itu diciptakan, situasi dan keadaan pada saat teks itu diciptakan. Yang keempat, kekuasaan yakni kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat yang tidak memandang alamiah, wajar, dan netral tetapi bentuk pertarungan kekuasaan. Yang terakhir ideologi, yang dibangun oleh kelompok dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka.

Analisis wacana kritis menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultural dalam domain-domain sosial yang berbeda (Jorgensen dan Philips, 2007: 114). Tujuan analisis wacana kritis adalah menjelaskan dimensi linguistik kewacanaan fenomena sosial dan kultural dan proses perubahan dalam modernitas terkini (Jorgensen dan Philips, 2007:116). Dengan demikian, analisis wacana kritis merupakan teori untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dengan menggunakan teks sebagai pintu masuk atau sumber data untuk analisisnya.

Menurut Van Dijk (dalam Eriyanto : 2011), melihat suatu teks terdiri dari atas beberapa struktur/tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Ia

membagi dalam tiga tingkatan. Pertama, Struktur Makro. Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema yang diangkat oleh suatu teks. Kedua, Superstruktur. Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. Ketiga, Struktur Mikro. Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks.

Dalam praktik analisisnya, AWK memanfaatkan sarana analisis wacana (biasa), tetapi dengan perspektif dan interpretasi yang lebih “dalam”. Beberapa sarana analisis wacana yang dimanfaatkan dalam AWK adalah struktur makro, yang meliputi antara lain skemata, latar, dan topik; dan struktur mikro yang meliputi semantik, sintaksis, dan retorik. Beberapa topik AWK yang penting adalah ideologi, pengetahuan, struktur, interaksi, dan makna. Kualitas suatu analisis wacana kritis akan selalu dinilai dari segi kemampuan untuk menempatkan teks dalam konteksnya yang utuh, holistik, melalui pertautan antara analisis pada jenjang teks dengan analisis terhadap konteks pada jenjang yang lebih tinggi. (Eriyanto,2005:xi).

Pandangan Bloomaert tentang AWK kurang lebih sama dengan pandangan dari ahli lain. Menurutnya AWK adalah rangkaian bahasa/wacana/wicara(*speech*) dan struktur sosial. AWK berusaha mengungkap cara-cara yang di dalamnya struktur sosial mempengaruhi pola-pola, relasi-relasi, dan model-model wacana (dalam bentuk relasi-relasi kuasa, efek-efek ideologi, dan seterusnya), dan dalam memperlakukan relasi-relasi itu sebagai masalah, para peneliti AWK menempatkan dimensi kritis dari penelitian mereka. Jadi pemakaian bahasa saja untuk membeberkan suatu dimensi sosial atas suatu peristiwa tidak cukup. Dimensi sosial yang dimaksud adalah obyek evaluasi moral dan politik, dan penelaahan dimensi-dimensi itu seharusnya mendatangkan dampak positif dalam masyarakat: memberdayakan kaum lemah, memberi suara kaum yang terbungkam, menyingkap penyimpangan kekuasaan, dan memobilisasi masyarakat untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Keterangan penting lain tentang AWK dari Bloomaert adalah *‘to understand the contemporary forms of inequality in and through language, we should look inside language as well as it in society, and both aspects of analysis are not separable’* (2005:35). Pandangan ini menjelaskan untuk memahami suatu wacana yang mengandung ketimpangan dalam dan melalui bahasa, harus memperhatikan bahasa

sebagaimana memperhatikan masyarakat, karena dua aspek analisis ini tidak dapat dipisahkan.

9. Bahasa dalam Politik

Language games ‘Permainan bahasa’ yang digagas oleh Wittgenstein merupakan tata permainan bahasa yang menunjukkan proses menyeluruh penggunaan kata atau pemakaian bahasa sebagai bentuk permainan. Gagasan Wittgenstein ini akan bisa terwujud jika mengkaitkan bahasa dengan realita pemakaian bahasa yang dilakukan oleh pengguna bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian memicu munculnya keanekaragaman berbahasa. Keanekaragaman yang dimaksud oleh Wittgenstein tersebut adalah keanekaragaman pemakaian bahasa yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bukan keanekaragaman macam bahasa seperti bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan lain-lain, dan juga bukan ragam bahasa ilmu pengetahuan seperti bahasa sastra, bahasa kedokteran, bahasa ekonomi dan semacamnya (Mustansyir, 1987:83). Dalam pandangan Wittgenstein keragaman permainan bahasa itu meliputi antara lain: memberi perintah dan mematuhi atau menolaknya, melaporkan jalannya suatu peristiwa, bertanya, mengucapkan salam, berterima kasih, memberikan pujian, menyindir, mengecam, mendoakan, meminta pendapat, dan sebagainya.

Peristiwa atau kejadian sehari-hari yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pengguna bahasa antara lain adalah kegiatan rapat di parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Rapat-rapat di parlemen / dewan perwakilan rakyat merupakan suatu peristiwa politik yang didalamnya terdapat pemakaian bahasa yang bersifat politis. Dalam pandangan Dylgjerii (2017:20), *political language deals with the use of power to organize people's mind and opinion. It is an instrument used to control the society in general* ‘bahasa yang bersifat politis berkaitan dengan penggunaan kekuasaan untuk mengatur pikiran dan opini publik. Bahasa tersebut digunakan untuk mengontrol/mengatur masyarakat secara umum’. Pemakaian bahasa dari para anggota dewan perwakilan rakyat pada setiap rapatnya menggambarkan sebuah praktek permainan bahasa dalam suatu peristiwa komunikasi politik sekaligus praktek penggunaan kekuasaan politik untuk mengatur masyarakat secara luas melalui bahasa.

Arti kata ‘politik’ itu sendiri, menurut kamus besar bahasa Indonesia versi online, adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) mengenai pemerintahan

negara atau terhadap negara lain ([http://kbbi. / web.id politik](http://kbbi.web.id)). Sedangkan menurut Orwell (1946), politik adalah masalah kekuasaan untuk membuat suatu keputusan, mengendalikan sumber daya, mengendalikan perilaku orang lain dan seringkali juga mengendalikan nilai-nilai yang dianut orang lain (dalam Thomas, 2007:50). Berkaitan dengan pemakaian bahasa, maka berbahasa dalam kegiatan politik, yang antara lain terjadi dalam rapat atau sidang dewan perwakilan rakyat daerah, merupakan wujud dari permainan bahasa seperti yang digagas oleh Wittgenstein. Dengan kata lain, pemakaian bahasa yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat dalam kegiatan rapat menunjukkan permainan pemakaian bahasa dalam peristiwa komunikasi politik yang melibatkan unsur kekuasaan dalam menentukan suatu keputusan atau kebijakan.

Pemakaian bahasa dalam ranah politik berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat atau konflik dari para pelaku tuturnya karena tuturan-tuturan ilokusinya yang bersifat mengancam muka seperti tindak tutur memerintah, melarang, meminta pendapat, menolak, dan lain-lain; dan tuturan-tuturan ilokusi seperti itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh faktor sosial dari penuturnya. Selain itu, dalam hal kesantunan berbahasa, berpotensi memunculkan model kesantunan bertindak tutur yang bersifat politis.

10. Nilai Budaya Jawa dalam Berbahasa

Hofstede (1991) menyatakan bahwa setiap orang dalam dirinya membawa pola pikir, perasaan, dan perilaku yang dipelajari sepanjang hidup mereka *_'patterns of thinking, feeling, and acting which were learned throughout their lifetime*. Dalam masyarakat kolektif, seperti masyarakat Jawa, rasa malu (*shame*), dan citra diri (*face*) sangat diperhatikan (Hofstede, 1991: 60-61). Dengan kata lain penggunaan bahasa tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya penuturnya. Geertz (1961) sebagaimana dikutip oleh Magnis-Suseno (1984:42) dan Asim Gunarwan (2007d:301), menyatakan bahwa terdapat dua prinsip pokok yang sangat mempengaruhi pola pergaulan sosial di dalam masyarakat Jawa. Kedua prinsip pokok tersebut adalah prinsip *kerukunan* dan prinsip *kurmat*. Prinsip *kerukunan* mengacu pada satu kewajiban bagi setiap anggota masyarakat untuk menjaga keseimbangan sosial. Sedangkan prinsip *kurmat* atau hormat terkait dengan kewajiban setiap anggota masyarakat untuk menunjukkan sikap

hormat kepada orang lain sesuai dengan status dan kedudukan masing-masing dalam masyarakat.

Oleh Asim Gunarwan (2007:301) prinsip kerukunan dan prinsip hormat dari Geertz tersebut dijelaskan sebagai prinsip kerukunan atau prinsip keseimbangan, yang mengatur pergaulan sosial masyarakat Jawa. Dan prinsip ini dapat dijabarkan kedalam empat maksim yaitu: (1) maksim *kurmat* 'hormat' yang berarti menghormati orang lain, (2) maksim *andhap asor* 'rendah hati' yang berarti bersikap rendah hati terhadap orang lain, (3) maksim *empan papan* 'tahu diri tentang kedudukannya, dan (4) maksim *tepa slira* 'tenggang rasa/toleran' yang bermakna jangan lakukan kepada orang lain apa yang anda tidak mau orang lain melakukannya pada anda (Gunarwan, 2007:229).

Berangkat dari empat maksim Gunarwan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa keempat maksim tersebut merepresentasikan nilai-nilai budaya atau kehidupan di masyarakat Jawa: menghormati orang lain, rendah hati, sadar atas kedudukan diri, dan bertenggang rasa atau bersikap toleran. Nilai-nilai budaya atau kehidupan masyarakat itu oleh Koentjaraningrat digambarkan sebagai wujud kebudayaan yang berupa kompleksitas ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dsb. yang bersifat abstrak (1985:5), yang kemudian dalam praktek kehidupan di masyarakat membentuk sistem nilai budaya (1985:11).

11. DPRD Kabupaten Sukoharjo

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan lembaga legislatif di tingkat pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat propinsi disebut DPRD Propinsi serta tingkat Kota/Kabupaten disebut DPRD Kabupaten.

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai lembaga eksekutif. Oleh karenanya, negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas DPRD agar pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian kedudukan DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang sepadan meskipun punya fungsi dan tugas yang berbeda. Berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan

DPRD, maka DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang harus dijalankan sebagai wujud representasi rakyat:

1. Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
2. Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
3. Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Sebagai lembaga legislatif di pemerintahan daerah kabupaten, DPRD Kabupaten Sukoharjo memiliki ketiga fungsi diatas. Dari ketiga fungsi tersebut selanjutnya dimanefastasikan dalam bentuk tugas dan wewenang legislatif. Tugas dan wewenang legislatif DPRD Kabupaten Sukoharjo antara lain mencakup:

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Bupati/Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberi persetujuan rancangan peraturan pemerintah daerah mengenai anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Bupati/Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Kepala Daerah dan/atau Wakil Bupati/Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih Wakil Bupati/Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan sehari-hari fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Kabupaten Sukoharjo, maka diatur melalui lembaga internal DPRD yang berbentuk komisi, badan kerja, dan fraksi. Komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:

1. Komisi I : membidangi masalah hukum dan pemerintahan
2. Komisi II : membidangi masalah ekonomi dan keuangan
3. Komisi III : membidangi masalah pembangunan
4. Komisi IV: membidangi masalah kesejahteraan rakyat (pendidikan dan kesehatan)

Adapun badan kerja yang ada di DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah :

1. Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sukoharjo
2. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukoharjo
3. Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Sukoharjo
4. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo

Dan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil pemilu legislatif 2009-2014 meliputi:

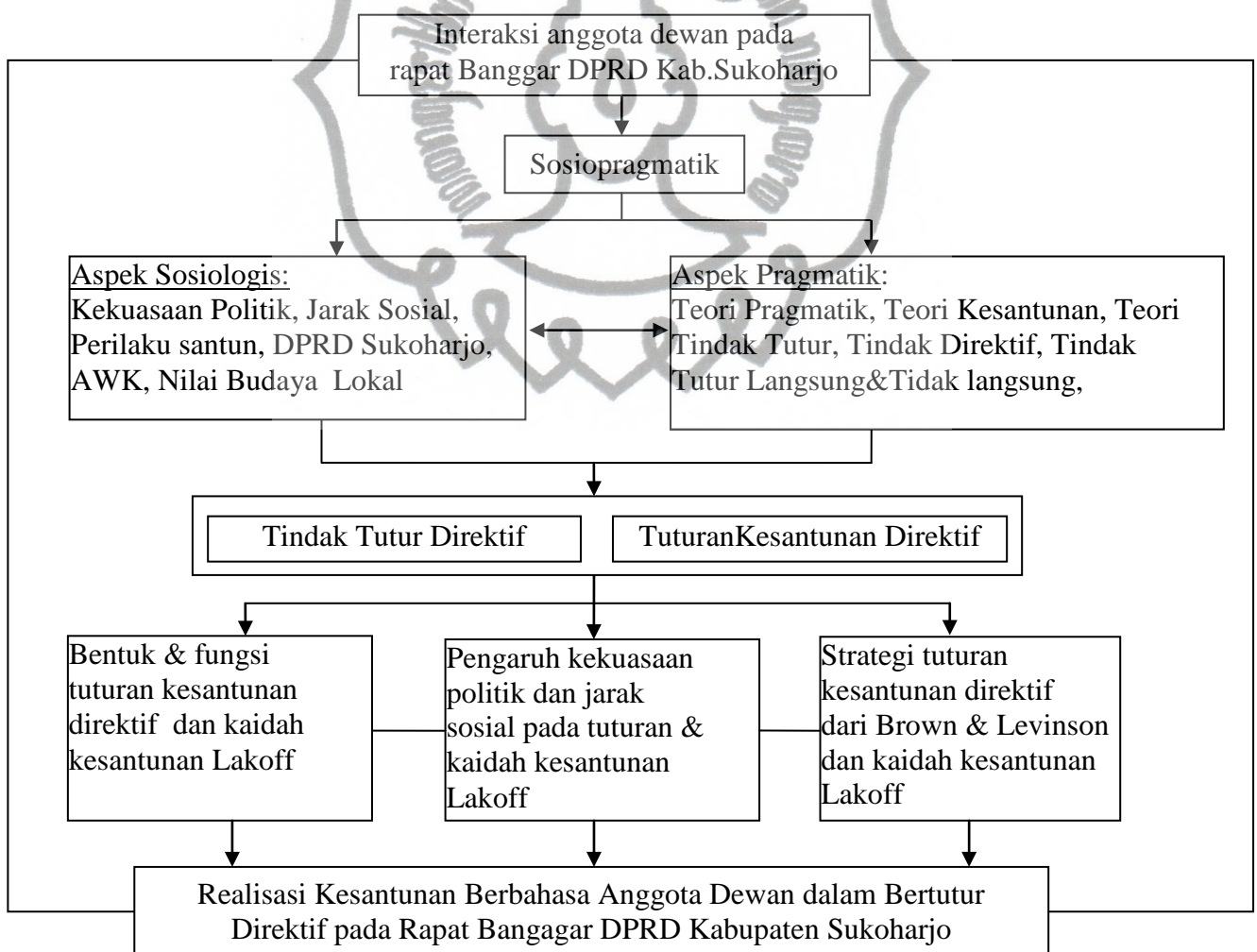
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. Fraksi Partai Golongan Karya
3. Fraksi Partai Amanat Nasional
4. Fraksi Partai Demokrat
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
6. Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani

Keberadaan komisi-komisi dan badan kerja di DPRD Kabupaten cenderung tetap tidak mengalami perubahan tidak terpengaruh oleh hasil pemilu legislatif. Ini berbeda dengan keberadaan fraksi-fraksi, keberadaannya akan dan bisa berubah, tergantung dengan hasil pemilu legislatif. Keanggotaan pada tiap-tiap komisi dan badan berasal dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sukoharjo, dengan kata lain gabungan dari fraksi-fraksi. Namun keanggotaan fraksi ditentukan oleh hasil suara pemilu legislatif dari partai-partai

politik yang memperoleh kursi suara di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Struktur organisasi pada tiap-tiap komisi, badan, dan fraksi adalah sama yaitu terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menunjukkan alat berpikir yang digunakan dalam penelitian secara komprehensif dan sistematis yang tersusun dari rangkaian teori- teori yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian yang sekarang ini menggambarkan alur konsep tentang kajian sosio-pragmatik tentang kesantunan berbahasa anggota dewan dalam bertindak tutur direktif pada rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo. Alur konsep tersebut divisualkan dalam gambar kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir

Gambar di atas menunjukkan kerangka berpikir yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian mengenai interaksi anggota dewan pada rapat DPRD Kabupaten Sukoharjo. Interaksi yang dimaksud merupakan sebuah peristiwa komunikasi yang terjadi antara anggota dewan sebagai penutur dari lembaga legislatif dengan wakil dari lembaga eksekutif sebagai mitra tuturnya. Interaksi yang terjadi pada rapat DPRD Kabupaten Sukoharjo menggambarkan suatu fenomena pemakaian bahasa yang bersifat formal. Sifat keformalan pemakaian bahasa tersebut didasari oleh peristiwa interaksi yang melatarinya yang menuntut berbahasa secara formal. Peristiwa interaksi tersebut terjadi pada rapat resmi pemerintahan yang melibatkan unsur legislatif dan eksekutif yang berlangsung di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Penggunaan bahasa yang dilakukan oleh para penutur bukan sekedar fenomena kebahasaan tetapi juga fenomena sosial (sosiopragmatik), sehingga untuk memahaminya perlu memperhatikan aspek sosiologis dan aspek penggunaan bahasa pragmatik.

Aspek sosiologis berkaitan dengan kekuasaan politik dan jarak sosial antara penutur dengan mitra tutur juga antar para penutur sendiri serta tingkat imposisi suatu tuturan. Aspek sosiologis yang lain, berkaitan dengan nilai budaya lokal yang melekat pada para penutur, nilai budaya lokal bisa memberi warna tertentu dalam pemakaian bahasa pada peristiwa interaksi di rapat formal di DPRD Kabupaten Sukoharjo. DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai sebuah institusi pemerintahan legislatif memiliki peran sosial yang strategis, sama seperti institusi pemerintahan eksekutif, dalam proses pembangunan bangsa dan negara di wilayah kabupaten Sukoharjo. Penggunaan bahasa yang baik, santun, atau tidak membuat gaduh di masyarakat oleh para anggota legislatif akan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat luas. Aspek pragmatik mengacu pada teori-teori kebahasaan yang digunakan sebagai landasan teori maupun cara untuk menganalisis tuturan, khususnya tuturan-tuturan direktif. Teori-teori kebahasaan tersebut meliputi teori pragmatik, teori kesantunan bahasa, teori tindak tutur, tindak tutur direktif, tindak tutur langsung dan tidak langsung.

Paduan aspek sosiologis dan aspek pragmatik digunakan untuk mengkaji pemakaian bahasa para anggota legislatif pada saat rapat. Pemakaian bahasa tersebut berfokus pada pemakaian bahasa secara santun dalam bertindak tutur direktif yang dilakukan oleh para anggota legislatif. Pemakaian bahasa tersebut mencakup bentuk dan fungsi tuturan kesantunan direktif, makna tuturan kesantunan direktif, implikatur,

pengaruh aspek kekuasaan politik dan jarak sosial pada tuturan, dan strategi bertutur direktif secara santun. Dari cakupan pemakaian bahasa ini selanjutnya diurai menjadi tiga bagian, yang merupakan tiga masalah yang disorot dalam penelitian ini. Ketiga bagian tersebut yang pertama adalah bentuk dan fungsi tuturan kesantun direktif menurut kaidah kesantunan Lakoff, yang kedua adalah pengaruh aspek kekuasaan politik dan jarak sosial pada tuturan kesantunan direktif menurut kaidah kesantunan Lakoff dan yang ketiga adalah jenis-jenis strategi tuturan kesantunan direktif yang digunakan oleh para penutur (anggota legislatif) pada rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo. Pada akhirnya ketiga hal tersebut mengilustrasikan kesantunan berbahasa dari anggota legislatif DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam bertindak tutur direktif pada peristiwa interaksi di rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo.

